



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

Triwulan II
2026



LAPORAN EVALUASI MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
Website : <https://bapenda.sumselprov.go.id>

Palembang, 07 Juli 2026

Nomor : 050/I/000820/Penda/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri
Akuntabilitas Kinerja Triwulan II
Tahun 2026

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Badan
2. Para Kepala Bidang
3. Kepala UPTB Puslia
4. Para Kepala UPTB PPD Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan

di

Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bersama ini disampaikan hasil evaluasi penilaian mandiri akuntabilitas kinerja triwulan II Tahun 2026 di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, (terlampir).

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian mandiri tersebut, diminta kepada Saudara dapat menindaklanjuti rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

**EVALUASI KINERJA HASIL PENILAIAN MANDIRI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TRIWULAN II TAHUN 2026
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO.	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		KRITERIA		Catatan Hasil Evaluasi PM		PENANGGUNGJAWAB
1.	Perencanaan Kinerja	1.	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	1.	Terdapat Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja	1.	Pedoman teknis perencanaan kinerja Bidang Pajak disesuaikan kembali sesuai dengan target dalam UU 1/2022 tentang HKPD	Bidang Pajak
						2.	Pedoman teknis perencanaan kinerja Bidang P2PATDA disesuaikan kembali sesuai dengan target dalam PP 35/2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bidang P2PATDA
						3.	Pedoman teknis perencanaan kinerja Bidang PDLL disesuaikan kembali sesuai dengan target dalam Perda 3/2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bidang PDLL
						4.	Pedoman teknis perencanaan kinerja Bidang Wasbin disesuaikan kembali sesuai dengan <i>cascading</i> dan cross-cutting internal dan eksternal	Bidang Wasbin
						5.	Pedoman teknis perencanaan kinerja Sekretariat disesuaikan kembali sesuai dengan hasil penilaian <i>e-kinerja</i> individu pegawai	Sekretariat
						6.	Pedoman teknis perencanaan kinerja UPTB Puslia disesuaikan kembali sesuai dengan hasil pelaksanaan elektronifikasi pemerintah daerah	UPTB Puslia
				2.	Terdapat Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Jangka Panjang	1.	Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka panjang Bidang Pajak disesuaikan kembali sesuai dengan target dan indicator yang tertuang di dalam dokumen RPJPD 2005 – 2025	Bidang Pajak
						2.	Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka panjang Bidang P2PATDA disesuaikan kembali sesuai dengan target dan indicator yang tertuang di dalam dokumen RPJPD 2005 – 2025	Bidang P2PATDA
						3.	Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka panjang Bidang PDLL disesuaikan kembali sesuai dengan target dan indicator yang tertuang di dalam dokumen RPJPD 2005 – 2025	Bidang PDLL

					4.	Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka panjang Bidang Wasbin disesuaikan kembali sesuai dengan target dan indicator yang tertuang di dalam dokumen RPJPD 2005 – 2025	Bidang Wasbin
					5.	Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka panjang Sekretariat disesuaikan kembali sesuai dengan target dan indicator yang tertuang di dalam dokumen RPJPD 2005 – 2025	Sekretariat
					6.	Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka panjang UPTB Puslia disesuaikan kembali sesuai dengan target dan indicator yang tertuang di dalam dokumen RPJPD 2005 – 2025	UPTB Puslia
			3.	Terdapat Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Jangka Menengah	1.	Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka menengah Bidang Pajak seharusnya merupakan cascading level di bawah perencanaan kinerja jangka panjang sehingga terlihat penjenjangan kinerja dalam skala 5 tahunan	Bidang Pajak
					2.	Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka menengah Bidang P2PATDA seharusnya merupakan cascading level di bawah perencanaan kinerja jangka panjang sehingga terlihat penjenjangan kinerja dalam skala 5 tahunan	Bidang P2PATDA
					3.	Perbaiki indikator kinerja Bidang PDLL diselaraskan dengan penjenjangan kinerja dari perencanaan kinerja jangka panjang	Bidang PDLL
					4.	Perbaiki indikator kinerja Bidang Wasbin diselaraskan dengan penjenjangan kinerja dari perencanaan kinerja jangka panjang	Bidang Wasbin
					5.	Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka menengah Sekretariat seharusnya merupakan cascading level di bawah perencanaan kinerja jangka panjang sehingga terlihat penjenjangan kinerja dalam skala 5 tahunan	Sekretariat
					6.	Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka menengah UPTB Puslia seharusnya merupakan cascading level di bawah perencanaan kinerja jangka panjang sehingga terlihat penjenjangan kinerja dalam skala 5 tahunan	UPTB Puslia
			4.	Terdapat Pedoman Teknis	1.	Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka	Bidang Pajak

					Perencanaan Kinerja Jangka Pendek		pendek Bidang Pajak ditambahkan dukungan anggaran yang mendukung kinerja	
						2.	Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka pendek Bidang P2PATDA disesuaikan dengan hasil evaluasi baseline realisasi tahun sebelumnya	Bidang P2PATDA
						3.	Tambahkan definisi operasional perhitungan indicator Bidang PDLL pada pedoman teknis perencanaan kinerja jangka pendek	Bidang PDLL
						4.	Tambahkan hasil evaluasi SPIP BPKP sebagai rekomendasi perbaikan indicator kinerja Bidang Wasbin	Bidang Wasbin
						5.	Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka pendek Sekretariat disesuaikan dengan hasil evaluasi baseline realisasi tahun sebelumnya	Sekretariat
						6.	Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka pendek UPTB Puslia ditambahkan dukungan anggaran yang mendukung kinerja	UPTB Puslia
				5.	Terdapat Dokumen Perencanaan Aktivitas yang mendukung kinerja	1.	Tambahkan penjelasan cross-cutting aktivitas Bidang Pajak dengan stakeholder eksternal	Bidang Pajak
						2.	Target perencanaan kinerja Bidang P2PATDA dibuat per triwulan	Bidang P2PATDA
						3.	Tambahkan target waktu pelaksanaan aktivitas Bidang PDLL yang mendukung kinerja	Bidang PDLL
						4.	Tambahkan efisiensi penggunaan sumber daya Bidang Wasbin terhadap aktivitas mendukung kinerja	Bidang Wasbin
						5.	Tambahkan kekuatan human capital internal yang mendukung aktivitas kinerja Sekretariat	Sekretariat
						6.	Tambahkan dukungan anggaran per triwulan rencana penarikan dana mendukung aktivitas kinerja UPTB Puslia	UPTB Puslia
				6.	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja	1.	Perbaikan tabel perbandingan perencanaan anggaran dengan anggaran yang tersedia dalam RKA/DPA Bidang Pajak	Bidang Pajak
						2.	Perbaikan tabel perbandingan perencanaan anggaran dengan anggaran yang tersedia dalam RKA/DPA Bidang P2PATDA	Bidang P2PATDA
						3.	Perbaikan tabel perbandingan perencanaan anggaran dengan anggaran yang tersedia dalam RKA/DPA Bidang PDLL	Bidang PDLL
						4.	Perbaikan tabel perbandingan perencanaan	Bidang Wasbin

							anggaran dengan anggaran yang tersedia dalam RKA/DPA Bidang Wasbin	
						5.	Perbaikan tabel perbandingan perencanaan anggaran dengan anggaran yang tersedia dalam RKA/DPA Sekretariat	Sekretariat
						6.	Perbaikan tabel perbandingan perencanaan anggaran dengan anggaran yang tersedia dalam RKA/DPA UPTB Puslia	UPTB Puslia
				7.	Setiap unit satuan kerja merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja	1.	Rumusan dan penetapan perencanaan kinerja telah sesuai dan diformalkan	
		2.	Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART menggunakan penyalarsan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>cross-cutting</i>)	1.	Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan	1.	Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan	
				2.	Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan tepat waktu	1.	Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan di web bapenda prov sumsel	
				3.	Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai	1.	Perbaikan kinerja Bidang Pajak sesuai dengan hasil analisis eviws terkait indikator pencapaian tujuan dan sasaran OPD	Bidang Pajak
						2.	Perbaikan kinerja Bidang P2PATDA sesuai dengan hasil analisis eviws terkait indikator pencapaian tujuan dan sasaran OPD	Bidang P2PATDA
						3.	Perbaikan kinerja Bidang PDLL sesuai dengan hasil analisis eviws terkait indikator pencapaian tujuan dan sasaran OPD	Bidang PDLL
						4.	Perbaikan kinerja Bidang Wasbin sesuai dengan hasil analisis eviws terkait indikator pencapaian tujuan dan sasaran OPD	Bidang Wasbin
						5.	Perbaikan kinerja Sekretariat sesuai dengan	Sekretariat

						hasil analisis eviws terkait indikator pencapaian tujuan dan sasaran OPD	
					6.	Perbaiki kinerja UPTB Puslia sesuai dengan hasil analisis eviws terkait indikator pencapaian tujuan dan sasaran OPD	UPTB Puslia
			4.	Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai	1.	Perumusan indikator Bidang Pajak disesuaikan kembali sesuai dengan hasil analisis eviws, menggambarkan bahwa indikator tersebut sebagai <i>critical success factor</i> pada sasaran strategis tingkat intermediate outcomes level	Bidang Pajak
					2.	Perumusan indikator Bidang P2PATDA disesuaikan kembali sesuai dengan hasil analisis eviws, menggambarkan bahwa indikator tersebut sebagai <i>critical success factor</i> pada sasaran strategis tingkat intermediate outcomes level	Bidang P2PATDA
					3.	Perumusan indikator Bidang PDLL disesuaikan kembali sesuai dengan hasil analisis eviws, menggambarkan bahwa indikator tersebut sebagai <i>critical success factor</i> pada sasaran strategis tingkat intermediate outcomes level	Bidang PDLL
					4.	Perumusan indikator Bidang Wasbin disesuaikan kembali sesuai dengan hasil analisis eviws, menggambarkan bahwa indikator tersebut sebagai <i>critical success factor</i> pada sasaran strategis tingkat intermediate outcomes level	Bidang Wasbin
					5.	Perumusan indikator Sekretariat disesuaikan kembali sesuai dengan hasil analisis eviws, menggambarkan bahwa indikator tersebut sebagai <i>critical success factor</i> pada sasaran strategis tingkat intermediate outcomes level	Sekretariat
					6.	Perumusan indikator UPTB Puslia disesuaikan kembali sesuai dengan hasil analisis eviws, menggambarkan bahwa indikator tersebut sebagai <i>critical success factor</i> pada sasaran strategis tingkat intermediate outcomes level	UPTB Puslia
			5.	Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi kriteria SMART	1.	Indikator kinerja Bidang Pajak belum spesifik mengarahkan pada tujuan dan sasaran OPD	Bidang Pajak
					2.	Indikator kinerja Bidang P2PATDA belum menggambarkan indikator yang jelas dan dapat dihitung dengan definisi operasional yang baku	Bidang P2PATDA

					3.	Indikator kinerja Bidang PDLL belum menggambarkan indikator yang dapat dicapai	Bidang PDLL
					4.	Indikator kinerja Bidang Wasbin harus relevant dengan pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Wasbin
					5.	Indikator kinerja Sekretariat harus berbasis waktu kondisi saat ini	Sekretariat
					6.	Indikator kinerja UPTB Puslia belum jelas menggambarkan target yang dapat diukur	UPTB Puslia
			6.	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable, tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis)	1.	IKU telah sesuai dengan indikator RPJMD dan telah sustainable	
			7.	Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (achievable), menantang dan realistik	1.	Target kinerja Bidang Pajak belum menggambarkan kinerja yang realistis untuk dicapai	Bidang Pajak
					2.	Target kinerja Bidang P2PATDA belum menggambarkan kinerja yang realistis untuk dicapai	Bidang P2PATDA
					3.	Target kinerja Bidang PDLL belum menggambarkan kinerja yang realistis untuk dicapai	Bidang PDLL
					4.	Target kinerja Bidang Wasbin belum menggambarkan kinerja yang realistis untuk dicapai	Bidang Wasbin
					5.	Target kinerja Sekretariat belum menggambarkan kinerja yang realistis untuk dicapai	Sekretariat
					6.	Target kinerja UPTB Puslia belum menggambarkan kinerja yang realistis untuk dicapai	UPTB Puslia
			8.	Setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level	1.	Perencanaan kinerja Bidang Pajak belum menggambarkan <i>cross-cutting</i> eksternal	Bidang Pajak

					jabatan (cascading)			
						2.	Perencanaan kinerja Bidang P2PATDA disesuaikan kembali sesuai dengan hasil cascading tujuan dan sasaran OPD	Bidang P2PATDA
						3.	Perencanaan kinerja Bidang PDLL disesuaikan kembali sesuai dengan hasil cascading tujuan dan sasaran OPD	Bidang PDLL
						4.	Perencanaan kinerja Bidang Wasbin disesuaikan kembali sesuai dengan hasil cascading tujuan dan sasaran OPD	Bidang Wasbin
						5.	Perencanaan kinerja Sekretariat disesuaikan kembali sesuai dengan hasil cascading tujuan dan sasaran OPD	Sekretariat
						6.	Perencanaan kinerja UPTB Puslia belum menggambarkan <i>cross-cutting</i> eksternal	UPTB Puslia
				9.	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>cross-cutting</i>)	1.	Tambahkan strategi yang akan dilaksanakan Bidang Pajak sehubungan dengan cross-cutting eksternal	Bidang Pajak
						2.	Tambahkan kebijakan yang akan dilaksanakan Bidang P2PATDA sehubungan dengan cross-cutting baik internal dan eksternal	Bidang P2PATDA
						3.	Tambahkan penjelasan hubungan tata kerja Bidang PDLL dengan OPD Pemungut Retribusi sehingga terjadi cross-cutting eksternal	Bidang PDLL
						4.	Tambahkan penjelasan hubungan tata kerja Bidang Wasbin dengan bidang sehingga terjadi cross-cutting internal	Bidang Wasbin
						5.	Tambahkan penjelasan hubungan tata kerja Sekretariat dengan bidang sehingga terjadi cross-cutting internal	Sekretariat
						6.	Tambahkan penjelasan hubungan tata kerja UPTB Puslia dengan bidang sehingga terjadi cross-cutting internal	UPTB Puslia
				10.	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja	1.	Seluruh pegawai telah membuat perjanjian kinerja terintegrasi dengan e-kinerja	
		3.	Perencanaan kinerja	1.	Anggaran yang ditetapkan			

			telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang bersinambungan		telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai			
				2.	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai			
				3.	Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the track	1.	Percepatan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Bidang Pajak karena hal ini sebagai alat untuk mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan	Bidang Pajak
						2.	Percepatan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Bidang P2PATDA karena hal ini sebagai alat untuk mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan	Bidang P2PATDA
						3.	Percepatan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Bidang PDLL karena hal ini sebagai alat untuk mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan	Bidang PDLL
						4.	Percepatan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Bidang Wasbin karena hal ini sebagai alat untuk mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan	Bidang Wasbin
						5.	Percepatan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Sekretariat karena hal ini sebagai alat untuk mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan	Sekretariat
						6.	Percepatan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada UPTB Puslia karena hal ini sebagai alat untuk mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan	UPTB Puslia
				4.	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala	1.	Pemantauan dan evaluasi secara berkala waktu telah dilaksanakan baik per triwulan dan per bulan	
				5.	Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya	1.	Catatan rekomendasi kinerja rendah pada periode sebelumnya untuk upaya perbaikan di masa mendatang agar dilihat kembali	Semua Bidang dan UPTB Puslia
				6.	Terdapat perbaikan/penyempurnaan	1.	Catatan rekomendasi kinerja rendah pada periode sebelumnya untuk upaya perbaikan di	Semua Bidang dan UPTB Puslia

					dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik		masa mendatang agar dilihat kembali	
				7.	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	1.	Unit/satuan kerja telah memahami untuk berkomitmen mencapai kinerja lebih baik sesuai dengan hasil rapat optimasi bersama Ka. Bapenda	Semua Bidang dan UPTB Puslia
				8.	Setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	1.	Unit/satuan kerja telah memahami untuk berkomitmen mencapai kinerja lebih baik sesuai dengan hasil rapat optimasi bersama Ka. Bapenda	Semua Bidang dan UPTB Puslia
2.	Pengukuran kinerja	1.	Pengukuran kinerja telah dilakukan	1.	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	1.	Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja telah ada dan sudah ada SOP nya	
				2.	Terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja	1.	Defisini operasional Bidang Pajak belum jelas, ditambahkan perhitungan yang realistis	Bidang Pajak
						2.	Defisini operasional Bidang P2PATDA belum jelas, ditambahkan perhitungan yang realistis	Bidang P2PATDA
						3.	Defisini operasional Bidang PDLL belum jelas, ditambahkan perhitungan yang realistis	Bidang PDLL
						4.	Defisini operasional Bidang Wasbin belum jelas, ditambahkan perhitungan yang realistis	Bidang Wasbin
						5.	Defisini operasional Sekretariat belum jelas, ditambahkan perhitungan yang realistis	Sekretariat
						6.	Defisini operasional UPTB Puslia belum jelas, ditambahkan perhitungan yang realistis	UPTB Puslia
				3.	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan	1.	SOP mengenai mekanisme pengumpulan data kinerja telah ada	
		2.	Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	1.	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (<i>decision maker</i>) dalam mengukur capaian kinerja	1.	Pimpinan telah memberikan arahan terkait dengan kinerja dalam bentuk rapat koordinasi optimasi	

				2.	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan	1.	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan dengan indikator yang ingin dicapai	
				3.	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan	1.	Tambahkan data BPS sebagai pembanding data kinerja Bapenda	Semua Bidang dan UPTB Puslia
				4.	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala	1.	Melalui dokumen Kinerja dan Fakta Bapenda (KITAB) pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara berkala waktu	
				5.	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang	1.	Pemantauan atas pengukuran kinerja Bidang Pajak belum seluruhnya sampai ke level operasional	Bidang Pajak
						2.	Pemantauan atas pengukuran kinerja Bidang P2PATDA belum seluruhnya sampai ke level operasional	Bidang P2PATDA
						3.	Pemantauan atas pengukuran kinerja Bidang PDLL belum seluruhnya sampai ke level operasional	Bidang PDLL
						4.	Pemantauan atas pengukuran kinerja Bidang Wasbin belum seluruhnya sampai ke level operasional	Bidang Wasbin
						5.	Pemantauan atas pengukuran kinerja Sekretariat belum seluruhnya sampai ke level operasional	Sekretariat
						6.	Pemantauan atas pengukuran kinerja UPTB Puslia belum seluruhnya sampai ke level operasional	UPTB Puslia
				6.	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)	1.	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan alat analisis eviews dengan Sistem Informasi Kendali Kinerja (SI KEN KIN)	
				7.	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)	1.	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan alat analisis eviews dengan Sistem Informasi Kendali Kinerja (SI KEN KIN)	
		3.	Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment serta	1.	Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan)	1.	Hasil pengukuran kinerja telah dijadikan dasar pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) berdasarkan prestasi kerja	

			penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien		tunjangan kinerja/penghasilan			
				2.	Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional			
				3.	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi			
				4.	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja	1.	Pengukuran kinerja Bidang Pajak belum sepenuhnya mempengaruhi strategi pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Pajak
						2.	Pengukuran kinerja Bidang P2PATDA belum sepenuhnya mempengaruhi strategi pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang P2PATDA
						3.	Pengukuran kinerja Bidang PDLL belum sepenuhnya mempengaruhi strategi pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang PDLL
						4.	Pengukuran kinerja Bidang Wasbin belum sepenuhnya mempengaruhi strategi pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Wasbin
						5.	Pengukuran kinerja Sekretariat belum sepenuhnya mempengaruhi strategi pelaksanaan tugas dan fungsi	Sekretariat
						6.	Pengukuran kinerja UPTB Puslia belum sepenuhnya mempengaruhi strategi pelaksanaan tugas dan fungsi	UPTB Puslia
				5.	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja	1.	Pengukuran kinerja Bidang Pajak belum sepenuhnya mempengaruhi kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Pajak
						2.	Pengukuran kinerja Bidang P2PATDA belum sepenuhnya mempengaruhi kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang P2PATDA
						3.	Pengukuran kinerja Bidang PDLL belum sepenuhnya mempengaruhi kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang PDLL
						4.	Pengukuran kinerja Bidang Wasbin belum sepenuhnya mempengaruhi kebijakan	Bidang Wasbin

							pelaksanaan tugas dan fungsi	
						5.	Pengukuran kinerja Sekretariat belum sepenuhnya mempengaruhi kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi	Sekretariat
						6.	Pengukuran kinerja UPTB Puslia belum sepenuhnya mempengaruhi kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi	UPTB Puslia
				6.	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja	1.	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi aktivitas kinerja bidang	
				7.	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja	1.	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi proporsional anggaran	
				8.	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	1.	Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam efisiensi anggaran	
				9.	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	1.	Unit atau satuan kerja mulai memahami dan peduli pentingnya pengukuran kinerja	
				10.	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	1.	Unit atau satuan kerja mulai memahami dan peduli pentingnya pengukuran kinerja	
3.	Pelaporan Kinerja	1.	Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja	1.	Dokumen laporan kinerja telah disusun	1.	Dokumen laporan kinerja telah disusun	
				2.	Dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala	1.	Dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala per triwulan per bulan	
				3.	Dokumen laporan kinerja telah diformalkan	1.	Dokumen laporan kinerja telah diformalkan	
				4.	Dokumen laporan kinerja telah direviu	1.	Dokumen laporan kinerja Bidang Pajak sebagian baru dilakukan reviu	Bidang Pajak
						2.	Dokumen laporan kinerja Bidang P2PATDA sebagian baru dilakukan reviu	Bidang P2PATDA
						3.	Dokumen laporan kinerja Bidang PDLL sebagian baru dilakukan reviu	Bidang PDLL
						4.	Dokumen laporan kinerja Bidang Wasbin sebagian baru dilakukan reviu	Bidang Wasbin
						5.	Dokumen laporan kinerja Sekretariat sebagian baru dilakukan reviu	Sekretariat
						6.	Dokumen laporan kinerja UPTB Puslia sebagian	UPTB Puslia

						baru dilakukan reuiu	
				5.	Dokumen laporan kinerja telah dipublikasikan	1.	Dokumen laporan kinerja telah dipublikasikan
				6.	Dokumen laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu	1.	Dokumen laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu

Palembang, 17 Juli 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S.STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19810923 200012 1 001

Laporan Aksi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ RINCIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TRIWULAN II		CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II	PENANGGUNG JAWAB	KET
							TARGET	REALISASI			
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	2,02	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	1.422.980.200	1,01	2,200	217,82	Kepala Badan	
			2,02	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	510.000.000					
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Bapenda	84,07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.600.000	21,00	19,67	93,67	Kepala Badan	
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,458	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	98.500.000	0,23	0,590	256,52	Kabid P2PATDA	
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	1,28	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	120.800.000	0,64	(17,19)	(2.685,78)	Kepala Bidang PDLL	
5.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1,252	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.106.800.000	0,62	0,341	55,00	Kepala Bidang Pajak	
6.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	49,89	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	144.000.000	25,02	58,996	235,795	Kepala Bidang Wasbin	
7.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli	92,21	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	102.000.000	25,00	41,302	165,208	Kepala Bidang Pajak	

					Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	144.000.000				Kepala Bidang Pajak	
8.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi		6,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	546.003.720	2,5	58,698	2.347,92	Kepala Bidang P2PATDA	
9.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	9.1	Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,98	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	548.800.000	0,4	0,256	64,00	Kepala Bidang PDLL	
		9.2	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	1,18	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	342.700.000	0,12	0,355	295,83	Kepala Bidang Pajak	

NO.	SASARAN STRATEGIS LEVEL INTERMEDIATE OUTCOMES	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	KINERJA TRIWULAN II		RINCIAN AKTIVITAS	RISIKO PENUGASAN	ANGGARAN	SATUAN	PELAKSANA	KEGIATAN TRIWULAN II	
					TARGET	REALISASI						TARGET	REALISASI
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]		[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	2,02	1,01	2,200	Optimalisasi Pendapatan Daerah	Sinergi optimalisasi pendapatan bersama dengan Pansus DPRD Prov. Sumsel	1.288.886.060	6 bulan	Seluruh Bidang	10,00	2,58
								Sinergi dan kolaborasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB	546.003.720	17 Kab/Kota	Seluruh Bidang	25,00	0,00
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Bapenda	Nilai	84,07	10,00	12,03	Penugasan kinerja sampai ke level staf pelaksana (<i>cascading</i>)	Evaluasi dan pemantauan kinerja secara berkala waktu	72.600.000	4 kali	Seluruh Bidang	25,00	20,87
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks	0,458	0,23	0,590	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Sinergi dan kolaborasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB	98.500.000	17 Kab/Kota	Bidang P2PATDA	50,00	43,85
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	%	1,28	0,64	(17,19)	Sinergi dan koordinasi pendapatan transfer pusat	Konsolidasi fiskal dengan pemerintah pusat	120.800.000	4 kali	Bidang PDLL	15,00	8,54
5.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio	1,252	0,62	0,341	Pelaksanaan <i>door to door service</i>	Minimnya petugas penagihan yang berbasis kompetensi juru sita	2.106.800.000	8 kali	Bidang Pajak	10,00	2,44

6.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		%	12,51	25,02	58,996	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Optimalisasi objek retribusi daerah	144.000.000	2 semester	Bidang Wasbin	10,00	9,27
7.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)		%	92,21	25,00	41,302	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Minimnya sarana prasarana sebagai akibat luas jangkauan wilayah	102.000.000	4 kali	Bidang Pajak	20,00	4,68
								Pelaksanaan <i>door to door service</i>	Minimnya petugas penagihan yang berbasis kompetensi juru sita	2.036.800.000	8 kali	Bidang Pajak	10,00	2,44
								Optimalisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor	Jangkauan wilayah perairan sungai	454.000.000	2 kali	Bidang Pajak	25,00	26,16
8.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi		%	6,00	2,5	58,698	Ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Terbatasnya sumber potensi penerimaan pajak daerah	546.003.720	1 kali	Bidang P2PATDA	15,00	0,00
9.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	9.1	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	%	0,98	0,4	0,256	Diversifikasi penerimaan pajak daerah	Masih terdapatnya tunggakan penerimaan pajak daerah	548.800.000	1 kali	Bidang Pajak	25,00	11,18
		9.2	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Rasio	1,18	0,12	0,355	Intensifikasi penerimaan pajak daerah	Masih terdapatnya wajib pajak yang non aktif	342.700.000	2 kali	Bidang Pajak	10,00	1,31

NO.	SASARAN STRATEGIS LEVEL INTERMEDIATE OUTCOMES	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ RINCIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TRIWULAN II		CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II	PENANGGUNG JAWAB	KET
							TARGET	REALISASI			
1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap GDP	1,73	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.036.800.000	0,73	0,62	84,93	Bidang Pajak	
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	14,81	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	454.000.000	7,53	6,26	83,13	Bidang Pajak	
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	5,02	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	1.228.886.060	2,02	1,96	97,03	Bidang Pajak	
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	100	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	umlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	40.000.000	50,00	41,06	82,12	Bidang Pajak	
5.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	95,43	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	42.400.000	43,00	38,12	88,65	Bidang PDLL	
6.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	89,78	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	144.000.000	50,00	43,06	86,12	Bidang PDLL	
7.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	83,93	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	120.800.000	45,00	39,84	88,53	Bidang PDLL	

8.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	84,83	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	102.000.000	38,72	35,16	90,80	Bidang PDLL	
9.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	umlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	186.600.000	3	0,00	0,00	Bidang Pengawasan dan Pembinaan	
10.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	92,91	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi daerah	20.000.000	46,26	43,21	93,41	Bidang Pengawasan dan Pembinaan	
11.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	16,85	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi daerah	20.000.000	8,23	7,12	86,51	Bidang Pengawasan dan Pembinaan	
13.	Meningkatnya Penggalan Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	82,19	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	548.800.000	31,06	29,64	95,43	Bidang P2PATDA	
14.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	83,81	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	342.700.000	33,21	29,21	87,95	Bidang P2PATDA	

15.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama		93,62	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	342.700.000	30,00	23,61	78,70	Bidang P2PATDA	
16.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi		100,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	342.700.000	50,00	44,18	88,36	Bidang P2PATDA	
17.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	17.1	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	94,96	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	120.000.000	41,56	38,17	91,84	Sekretariat	
		17.2	Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	4,92	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.000.000	1,00	0,00	0,00	Sekretariat	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	73.000.000	1,00	1,00	100,00	Sekretariat	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.600.000	1,00	1,00	100,00	Sekretariat	
		17.3	Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	80,92	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	243.500.000	31,62	28,06	88,74	Sekretariat	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	372.800.000	27,83	25,00	89,83	Sekretariat	

				Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	293.200.000	25,00	20,00	80,00	Sekretariat	
18.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	62,67	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.771.400.000	35,63	33,71	94,61	UPTB Puslia	
19.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	91,54	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	342.700.000	40,00	32,16	80,40	UPTB Puslia	
20.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	79,21	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.771.400.000	35,63	33,71	94,61	UPTB Puslia	
21.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	41,78	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.771.400.000	35,63	33,71	94,61	UPTB Puslia	
22.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	100	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.771.400.000	35,63	33,71	94,61	UPTB Puslia	
23.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	100	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	546.003.720	50,00	39,42	78,84	UPTB PPD Wilayah Kabupaten Kota se Sumatera Selatan	
24.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	8,62	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	1.422.980.200	3,72	0,00	0,00	UPTB PPD Wilayah Kabupaten Kota se Sumatera Selatan	

25.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	9,60	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	70.000.000	4,14	2,15	51,93	UPTB PPD Wilayah Kabupaten Kota se Sumatera Selatan	
-----	---	--	------	------------------------------	---------------------------------------	------------	------	------	-------	---	--

NO.	SASARAN STRATEGIS LEVEL INTERMEDIATE OUTCOMES	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	KINERJA TRIWULAN II		RINCIAN AKTIVITAS	RISIKO PENUGASAN	ANGGARAN	SATUAN	PELAKSANA	KEGIATAN TRIWULAN II	
					TARGET	REALISASI						TARGET	REALISASI
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]		[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap GDP	%	1,73	0,73	0,62	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Minimnya sarana prasarana media penyampaian diseminasi pajak daerah	2.036.800.000	4 kali	Bidang Pajak	10,00	0,00
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	%	14,81	7,53	6,26	Penetapan wajib pajak daerah	Masih terdapatnya objek wajib pajak baru yang belum ditetapkan	454.000.000	1 kali	Bidang Pajak	5,00	0,00
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	%	5,02	2,02	1,96	Penagihan pajak daerah	Masih terdapatnya pengajuan doleansi pajak daerah	1.228.886.060	2 kali	Bidang Pajak	15,00	0,00
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	%	100	50,00	41,06	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Masih terdapatnya kesalahan dalam pembukuan dan pelaporan pajak daerah	40.000.000	4 kali	Bidang Pajak	25,00	0,00

5.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	Rasio	95,43	43,00	38,12	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Masih terdapatnya potensi retribusi yang belum digali untuk peningkatan PAD	42.400.000	2 kali	Bidang PDLL	5,00	0,00
6.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	%	89,78	50,00	43,06	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kerjasama pemanfaatan terhadap objek retribusi masih belum optimal	144.000.000	1 kali	Bidang PDLL	10,00	0,00
7.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	%	83,93	45,00	39,84	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Pola intensifikasi belum optimal terhadap penerimaan pusat	120.800.000	4 kali	Bidang PDLL	15,00	0,00
8.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	%	84,83	38,72	35,16	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Belum optimalnya penerimaan hibah	102.000.000	4 kali	Bidang PDLL	20,00	0,00
9.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	Nilai	3	3	0,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Belum optimalnya penerapan pengendalian intern pemerintah	186.600.000	4 kali	Bidang Pengawasan dan Pembinaan	15,00	0,00
10.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	%	92,91	46,26	43,21	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Belum optimalnya pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah	20.000.000	2 kali	Bidang Pengawasan dan Pembinaan	5,00	0,00

11.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	%	16,85	8,23	7,12	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Masih terdapatnya pelanggaran dalam pendapatan daerah	20.000.000	2 kali	Bidang Pengawasan dan Pembinaan	5,00	0,00
12.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan dalam Pelaksanaan Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	%	12,74	3,74	0,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Masih terdapatnya pelaksanaan yang belum tertib sesuai dengan SOP	186.600.000	4 kali	Bidang Pengawasan dan Pembinaan	15,00	0,00
13.	Meningkatnya Penggalan Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	%	82,19	31,06	29,64	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Pengembangan pajak daerah belum sepenuhnya mengacu pada kemampuan dan kapasitas daerah	548.800.000	1 kali	Bidang P2PATDA	5,00	0,00
14.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	%	83,81	33,21	29,21	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Penelitian berbasis atas daya dukung daerah belum optimal	342.700.000	1 kali	Bidang P2PATDA	10,00	0,00
15.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	%	93,62	30,00	23,61	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Belum optimalnya penggalan sumber retribusi baru bagi daerah	342.700.000	4 kali	Bidang P2PATDA	5,00	0,00

16.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi		%	100,00	50,00	44,18	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Masih terdapatnya kebijakan yang belum diharmonisasi terkait dengan kebijakan investasi daerah	342.700.000	1 kali	Bidang P2PATDA	15,00	0,00
17.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	%	94,96	41,56	38,17	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Masih terdapatnya jurnal koreksi atas pertanggungjawaban keuangan	120.000.000	4 kali	Sekretariat	10,00	0,00
		1.2	Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	%	4,92	1,00	0,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masih terdapatnya GAP antara dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	73.000.000	2 kali	Sekretariat	15,00	0,00
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja dilakukan secara berkala	72.600.000	4 kali	Sekretariat	15,00	0,00
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Evaluasi kinerja anggaran terhadap sasaran strategis belum optimal	73.000.000	2 kali	Sekretariat	15,00	0,00
		1.3	Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	%	80,92	5,00	2,34	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan tugas ASN belum optimal	372.800.000	4 kali	Sekretariat	20,00	0,00
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Masih minimnya pegawai yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kinerja ASN	372.800.000	4 kali	Sekretariat	20,00	0,00

								Fungsi						
								Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Peningkatan capacity building bagi pegawai terhadap peraturan terkait kinerja ASN	293.200.000	4 kali	Sekretariat	20,00	0,00
18.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	%	62,67	35,63	33,71	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Masih rendahnya penggunaan digitalisasi dalam SPBE	7.771.400.000	4 kali	UPTB Puslia	15,00	0,00	
19.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	%	91,54	40,00	32,16	Meningkatnya modern channel	Belum optimalnya kerjasama layanan e commerce pada pembayaran pajak	342.700.000	1 kali	UPTB Puslia	10,00	0,00	
20.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	%	79,21	35,63	33,71	Pengembangan digitalisasi dalam pembayaran pajak daerah	Belum optimalnya layanan berbasis digitalisasi	7.771.400.000	1 kali	UPTB Puslia	10,00	0,00	
21.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	%	41,78	35,63	33,71	Pemeliharaan asset tak berwujud	Masih rendahnya tingkat keamanan system informasi basis pajak daerah	7.771.400.000	2 kali	UPTB Puslia	15,00	0,00	
22.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	MBPs	100	35,63	33,71	Peningkatan akses internet pada blank spot area	Masih terdapatnya blank spot area	7.771.400.000	4 kali	UPTB Puslia	20,00	0,00	

23.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	%	100	50,00	39,42	Optimalisasi pendapatan pajak daerah	Masih rendahnya partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak daerah	546.003.720	4 kali	UPTB PPD Wilayah Kabupaten Kota se Sumatera Selatan	10,00	0,00
24.	Berkurangnya Tunggalan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggalan Pajak	%	8,62	3,72	0,00	Optimalisasi pelaksanaan door to door service	Masih terdapatnya tunggalan dalam pembayaran pajak daerah	1.422.980.200	4 kali	UPTB PPD Wilayah Kabupaten Kota se Sumatera Selatan	20,00	0,00
25.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	%	9,60	4,14	2,15	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Masih terdapatnya kesalahan perhitungan sesuai dengan NIKB	70.000.000	1 kali	UPTB PPD Wilayah Kabupaten Kota se Sumatera Selatan	15,00	0,00

Palembang, 17 Juli 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



DR. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001

Pengukuran Kinerja

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tahun Anggaran : 2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN II		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,01	2,200	217,82
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Bapenda	21,00	19,67	93,67
3.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	2,5	58,698	2.347,92
4.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,23	0,590	256,52
5.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	0,64	(17,19)	(2.685,78)
6.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,62	0,341	55,00
7.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	25,02	58,996	235,795
8.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD	25,00	41,302	165,208
9.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,4	0,256	64,00
		Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	0,12	0,355	295,83

Palembang, 17 Juli 2026



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

DR. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001